



**PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND* DAN PENGETAHUAN  
DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH (APBD)**

(Studi Empiris Terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi)

**SKRIPSI**

Oleh

**Choyrun Nisa  
NIM 120810301085**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND* DAN PENGETAHUAN  
DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH (APBD)**

(Studi Empiris Terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi)

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai Sarjana Ekonomi

Oleh

**Choyrun Nisa  
NIM 120810301085**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT. yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Orang tuaku yang sangat aku sayangi Bapak Ah.Hasan dan Ibu Siti Mariyam;
3. Saudara perempuanku satu-satunya Maria Ulfa;
4. Drajat Priyo Tri Atmojo yang selalu mendukungku;
5. Ravita Dwi Nugrahawati yang banyak membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir ini,
6. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
7. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang kubanggakan.

**MOTO**

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya Tuhan-mu lah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al Insyirah : 05 - 08)

“Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.”

(George Bernard Shaw)

“No one can teach you how to stay on the top, you need to find your own ingredient”

(Hitam Putih)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Choyrun Nisa

NIM : 120810301085

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul “**PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND* DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) (Studi Empiris Terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instituti mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap karya ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2016

Yang menyatakan,

Choyrun Nisa

NIM 120810301085

**SKRIPSI**

**PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND* DAN PENGETAHUAN  
DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH (APBD)**

(Studi Empiris Terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi)

Oleh

**Choyrun Nisa  
NIM 120810301085**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing II : Drs. Sudarno M.Si, Ak.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : "PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND* DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) (STUDI EMPIRIS TERHADAP DPRD KABUPATEN BANYUWANGI)"

Nama Mahasiswa : Choyrun Nisa

N I M : 120810301085

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 11 Mei 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak.

NIP.196701021992032002

Drs. Sudarno M.Si, Ak.

NIP. 196012251989021001

Ketua Program Studi  
S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.

NIP. 197107271995121001

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND* DAN PENGETAHUAN DEWAN  
TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN  
DAERAH (APBD)**

(Studi Empiris Terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Choyrun Nisa

NIM : 120810301085

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

**12 Mei 2016**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Kartika S.E, M.Sc, Ak (.....)  
NIP 198202072008122002

Sekretaris : (.....)

Anggota : (.....)

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.  
NIP 19630614 1990021001

**Choyrun Nisa**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) di Banyuwangi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini menggunakan sampel dari anggota dewan badan anggaran di DPRD Banyuwangi. Data dikumpulkan menggunakan *purposive sampling*, dan diuji menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji F, uji koefisien determinasi dan uji t (parsial). Hasil pengujian uji parsial menunjukkan bahwa *personal background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Kata kunci : *Personal Background*, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

**Choyrun Nisa**

*Accounting Department, Economic Faculty, Jember University*

## **ABSTRACT**

*This research was intended to analyze The Influence Of Personal Background And Council Budget Knowledge For Region Financial Control. The independent variable in this study is personal background and Council Budget Knowledge. Dependent variable in this study is Region Financial Control. This study used a sample of members of the boards of parliamentary budget in Banyuwangi. Data were collected using purposive sampling, and tested using descriptive statistical analysis, test data quality, classic assumption test, multiple regression analysis, F test, test the coefficient of determination and t test (partial). The test results show that the partial test personal background positive and significant impact on the region financial control. And the council knowledge about budgets and significant negative effect on the region financial control.*

*Keywords : Personal Background, Council Budget Knowledge and Region Financial Control.*

## RINGKASAN

**Pengaruh *Personal Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) (Studi Empiris Terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi).** Choyrun Nisa, 120810301085; 2016: 60 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Peraturan baru otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadikan kekuasaan dan tanggungjawab yang dibebankan kepada pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri secara maksimal. Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada Pemerintah Pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD), sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih jelas. Manajemen keuangan daerah saat ini menjadi tanggungjawab penuh pemerintah daerah dan DPRD bertugas mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi sistem individu secara pribadi (Winarna dan Murni, 2007). Setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan mungkin dapat mempengaruhi tugasnya sebagai anggota dewan. Sehingga, perlu ditelaah lebih dalam variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja anggota dewan dalam mengawasi keuangan daerah. Variabel-variabel tersebut meliputi *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran. *Personal background* merupakan latar belakang yang berkaitan dengan sumber daya seorang individu. Sedangkan Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pemahaman anggota DPRD tentang

anggaran mulai dari peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan sampai tahap pertanggungjawaban.

Objek penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat penelitian. APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp. 2,80 triliun. Banyuwangi pernah mendapat peringkat 11 kota terkaya se-Indonesia dan menjadi kota terkaya kedua se-jawa timur yang diliris oleh Warta Ekonomi pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sampel yang digunakan yaitu anggota dewan yang terlibat dalam pengawasan keuangan daerah yaitu badan anggaran sebanyak 25 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan hasil pengujian uji parsial menunjukkan bahwa *personal background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Artinya semakin baik *Personal background* dari anggota dewan maka kapabilitas yang diberikan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) juga akan semakin besar. Sedangkan hasil pengujian uji parsial menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Artinya dewan tidak harus paham mengenai anggaran utinitas kerja dan pengalaman kerja menjadi media pembelajaran yang lebih efektif dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahim...*

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh *Personal Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) (Studi Empiris Terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendak-Mu lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember;
3. Dr. H. M. Fathorrazi, M.si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak. dan Drs. Sudarno M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
7. Dosen akuntansi yang telah memberikan pemahaman mengenai akuntansi;
8. Kedua orang tuaku (Ah.Hasan dan Siti Mariyam) tercinta, dan saudara perempuanku satu-satunya (Maria Ulfa) yang selalu memberikan semangat,

dukungan, nasihat, materi serta memberikan do'a yang senantiasa mengiringi setiap langkah keberhasilanku;

9. Drajat Priyo Triatmojo yang selalu menemani dan memberikat suntikan semangat;
10. *Second Family* (Ravita, Amel, Azzil, Desi, Wiwin, Agung, Saufi, Zaki, dan Tian yang telah menemaniku selama 4 tahun terakhir. Yang memberikan kenangan suka, cita, tawa, sedih, senang yang telah kita lewati bersama. Terimakasih atas kenangan dan kebersamaan dari kalian. Semoga persahabatan kita berlanjut walaupun kita sudah jarang berkumpul dan bertemu;
11. Anggota HMJA periode 2014 yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran untuk dapat hidup berdampingan dalam suatu organisasi walaupun banyak perbedaan argumen yang menghalangi;
12. Keluarga KKN 06, pak kordes Bagus, Brenda, Mega, Bella, Tutus, Zul, Amin dan mas Deky yang telah memberikan pembelajaran hidup selama mengabdikan di Desa Darungan, Lumajang;
13. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
14. Semua pihak yang membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan. Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan kalian. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
RINGKASAN .....	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	<b>6</b>
2.1.1 Teori Peran ( <i>The Role Theory</i> ).....	6

2.1.2	Teori Keagenan .....	7
<b>2.2</b>	<b>Fungsi dan Tugas DPRD .....</b>	<b>7</b>
2.2.1	Fungsi DPRD .....	7
2.2.2	Tugas dan Wewenang DPRD .....	8
<b>2.3</b>	<b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....</b>	<b>9</b>
2.3.1	Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	9
2.3.2	Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	10
2.4	Tinjauan Konsep .....	11
2.4.1	Pengawasan Keuangan Daerah .....	11
2.4.2	<i>Personal Background</i> .....	13
2.4.3	Pengetahuan Dewan tentang Anggaran .....	15
<b>2.5</b>	<b>Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>17</b>
<b>2.6</b>	<b>Kerangka Pemikiran Teoritis .....</b>	<b>21</b>
<b>2.7</b>	<b>Hipotesis Penelitian.....</b>	<b>22</b>
 <b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>		
<b>3.1</b>	<b>Rancangan Penelitian .....</b>	<b>25</b>
<b>3.2</b>	<b>Jenis Data dan Sumber Data .....</b>	<b>25</b>
<b>3.3</b>	<b>Populasi dan Sampel.....</b>	<b>25</b>
<b>3.4</b>	<b>Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>26</b>
<b>3.5</b>	<b>Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>26</b>
3.5.1	Variabel Penelitian .....	26
3.5.2	Definisi Operasional Variabel.....	27
<b>3.6</b>	<b>Metode Analisis Data.....</b>	<b>29</b>
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif .....	29
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	29
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	30
3.6.4	Pengujian Hipotesis.....	31

**3.7 Kerangka Pemecahan Masalah ..... 34**

**BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Analisis Deskriptif..... 35**

**4.2 Uji Kualitas Data ..... 42**

    4.2.1 Uji Validitas ..... 42

    4.2.2 Uji Reliabilitas ..... 44

**4.3 Uji Asumsi Klasik ..... 45**

    4.3.1 Uji Normalitas..... 45

    4.3.2 Uji Multikolinearitas ..... 46

    4.3.3 Uji Heteroskedastisitas..... 47

**4.4 Pengujian Hipotesis ..... 49**

    4.4.1 Analisis Linier Berganda ..... 49

    4.4.2 Uji F ..... 50

    4.4.3 Koefisien Determinasi (Uji  $R^2$ ) ..... 50

    4.4.4 Uji t ..... 51

**4.5 Pembahasan Hasil Penelitian..... 52**

**BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan..... 56**

**5.2 Keterbatasan ..... 56**

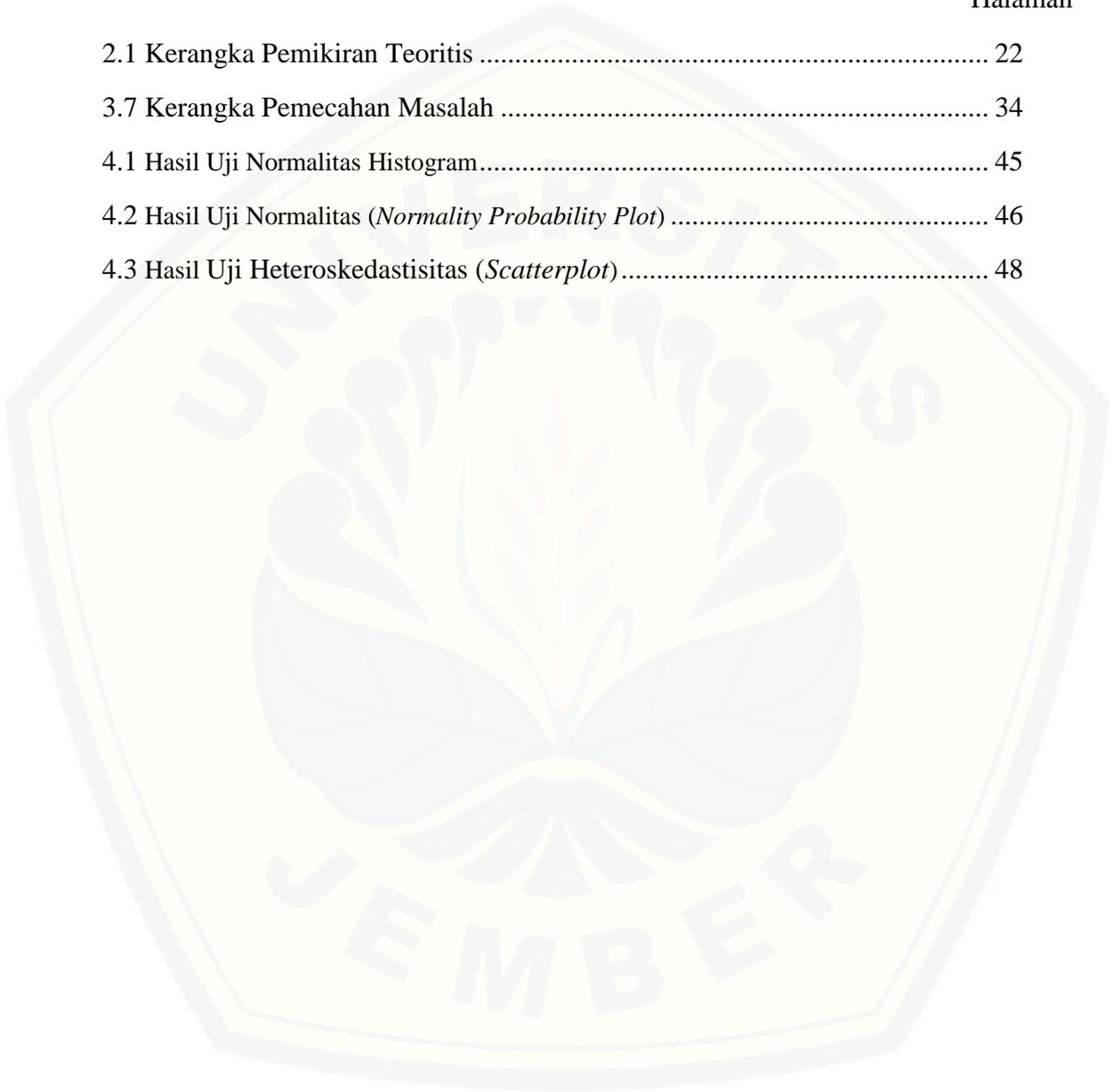
**5.3 Saran ..... 56**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 58**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	22
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah .....	34
4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram.....	45
4.2 Hasil Uji Normalitas ( <i>Normality Probability Plot</i> ) .....	46
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas ( <i>Scatterplot</i> ).....	48



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
4.1 Populasi Penelitian .....	35
4.2 Badan-Badan Dalam DPRD.....	35
4.3 Distribusi Kuesioner .....	36
4.4 Jenis Kelamin .....	37
4.5 Usia .....	37
4.6 Strata Pendidikan .....	38
4.7 Lama Kerja di Pemerintahan .....	38
4.8 Pengalaman Organisasi .....	39
4.9 Jabatan di DPRD .....	39
4.10 Asal Fraksi .....	40
4.11 Statistik Deskriptif <i>Personal Background</i> .....	40
4.12 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	41
4.13 Hasil Uji Validitas Variabel $X_1$ .....	42
4.14 Hasil Uji Validitas Variabel $X_2$ .....	43
4.15 Hasil Uji Validitas Variabel Y .....	43
4.16 Hasil Uji Reliabilitas .....	42
4.17 Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
4.18 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	49
4.19 Hasil Uji F.....	50
4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	50
4.21 Hasil Uji t .....	51

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Lampiran
1. Permohonan Bantuan Pengisian Responden.....	1
2. Kuesioner Penelitian .....	1
3. Statistik Deskriptif Data Responden .....	2
4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	2
5. Hasil Uji Validitas.....	3
6. Hasil Uji Reliabilitas .....	4
7. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	5
8. Hasil Pengujian Hipotesis .....	6
9. Rekapitulasi Jawaban Responden .....	7
10. Data Responden .....	8

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan baru otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadikan kekuasaan dan tanggungjawab yang dibebankan kepada pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri secara maksimal. Hal ini bertujuan agar distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat tercapai. Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada Pemerintah Pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD), sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih jelas. Manajemen keuangan daerah saat ini menjadi tanggungjawab penuh pemerintah daerah dan DPRD bertugas mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 32 tentang pemerintahan daerah menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kepentingan administratif, pengawasan, dan evaluasi struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: 1) pengawasan atas keuangan daerah dilakukan oleh dewan, 2) serta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh eksternal yaitu BPK. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 pasal 2 menyebutkan bahwa lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Semua pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan meliputi keseluruhan proses atau siklus

anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban program kerja eksekutif.

Berdasarkan penjelasan di atas salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). Oleh karenanya, diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Namun, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan program kerja yang ada dalam anggaran daerah belum terealisasi sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah.

Pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi sistem individu secara pribadi (Winarna dan Murni, 2007). Setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan mungkin dapat mempengaruhi tugasnya sebagai anggota dewan. Kelemahan yang terjadi atas pengawasan keuangan daerah mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya maupun individunya sebagai pelaku politik. Sehingga, perlu ditelaah lebih dalam variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja anggota dewan dalam mengawasi keuangan daerah. Variabel-variabel tersebut meliputi *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran.

*Personal background* merupakan latar belakang yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Latar belakang dalam penelitian ini adalah latar belakang pendidikan dewan, tingkat pendidikan dewan, pengalaman organisasi dewan, pengalaman menjadi anggota dewan, masa kerja di pemerintahan dan pelatihan tentang keuangan daerah. *Personal background* berkaitan erat dengan sumber daya manusia setiap individu. Sumberdaya manusia menjadi pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi, sehingga harus dipastikan sumber daya manusia ini dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007). Jika dapat mengelola sumber daya manusia tersebut secara optimal maka pelayanan dan kualitas kerja dari para dewan juga akan lebih baik.

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pemahaman anggota DPRD tentang anggaran mulai dari peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan sampai tahap pertanggungjawaban. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat penting kaitannya dalam penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat berhubungan dalam pengawasan keuangan daerah. Seorang anggota dewan harus mengetahui tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur tentang keuangan daerah. Peraturan, kebijakan dan prosedur tersebut terdiri dari Undang-Undang, peraturan pemerintahan, ketentuan presiden, peraturan daerah, kebijakan daerah, dan lain-lain. Dengan pengetahuan tentang anggaran yang dimiliki oleh anggota dewan dapat membantu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas keuangan daerah.

Beberapa peneliti terdahulu yang meneliti tentang pengawasan APBD diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Handoyo (2011) mengemukakan bahwa *personal background* seperti strata pendidikan dan latar belakang pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Wibowo (2012) dan Nuarta (2014) membuktikan bahwa variabel berupa jenis kelamin, tingkat pendidikan serta pengalaman di bidang politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan. Selain faktor *personal background* ada variabel lain yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran, penelitian Kinarsih (2013) menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Wibowo (2012) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh negatif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Adanya perbedaan hasil dan belum konsistennya penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Objek penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat penelitian. APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp. 2,80 triliun. Banyuwangi pernah mendapat peringkat 11 kota terkaya se-Indonesia dan

menjadi kota terkaya kedua se-jawa timur yang diliris oleh Warta Ekonomi pada tahun 2012. Besarnya APBD Kabupaten Banyuwangi membutuhkan pengawasan yang lebih bijak agar penyalahgunaan anggaran tidak akan terjadi.

Dari uraian latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Personal Background* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah APBD (Studi Empiris Terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai fungsi dan wewenang dalam melakukan pengawasaan terhadap keuangan daerah. Beberapa penelitian di Indonesia mengenai peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan variabel-variabel dari dalam anggota dewan, seperti *personal background* dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran masih belum konsisten. Masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *personal background* dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) ?
2. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *personal background* dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

**5. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah (APBD).
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Peran ( *The Role Theory* )

Teori peran (*The Role Theory*) adalah perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran merupakan bagian dari teori psikologis sosial yang digunakan untuk menganalisis interaksi sosial (Amalia, 2013). Teori ini beranggapan bahwa seorang individu dapat berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dijalani. Perilaku individu akan mempengaruhi peran individu tersebut dalam suatu organisasi atau kelompok. Setiap peran berhubungan dengan suatu identitas yang menggambarkan individu dalam hal bagaimana mereka bertindak dalam situasi khusus. Sejumlah orang mempunyai peran dan identitas, bergantung pada situasi di mana mereka menemukan diri mereka (Ikhsan dan Ishak, 2008 dalam Dewi, 2011). Oleh karena itu, setiap orang harus memahami peran masing-masing dalam suatu organisasi.

Kaitannya dengan peran seorang anggota dewan adalah seorang anggota dewan harus berperilaku sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan. Anggota dewan dituntut untuk menjalankan perannya dengan baik dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Anggota dewan dalam hal ini sebagai individu dalam kelompok sosial yang melakukan kegiatan politik, maka perilaku anggota tersebut akan mempengaruhi perannya dalam melaksanakan tugas pengawas keuangan daerah (APBD).

Peran anggota DPRD khususnya dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) ditujukan untuk memastikan pelaksanaan keuangan daerah (APBD) sudah sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang efektif dari DPRD dapat meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan. Sehingga, peran anggota DPRD dalam menjalankan pengawasan keuangan daerah sangatlah penting. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah yang secara maksimal diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan mendorong terwujudnya *good governance*.

### 2.1.2 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya hubungan yang terjadi antara manager dengan pemegang saham. Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (*prinsipal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Goodfrey, 2010 : 362).

Teori keagenan apabila dihubungkan dengan akuntansi sektor publik berarti masyarakat bertindak sebagai *principal* yang memberikan amanah kepada anggota dewan selaku *agent* untuk menjalankan tugasnya mengawasi kinerja keuangan daerah. Dalam pendekatan keagenan apabila dikaitkan dengan pemerintahan daerah, pemerintah daerah atau eksekutif merupakan agen dan DPRD atau legislatif merupakan prinsipal (Werimon, dkk, 2007 dalam Amalia 2013). Pemerintah daerah dalam hal ini sebagai agen diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat dengan cara menggunakan APBD secara efektif dan efisien. Sedangkan DPRD sebagai prinsipal yang diberikan tugas sebagai wakil rakyat harus mampu menjalankan apa yang menjadi amanah dari rakyat sebagai dewan pengawas yang mengawasi kinerja pemerintahan daerah.

## 2.2 Fungsi dan Tugas DPRD

### 2.2.1 Fungsi DPRD

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 149 tentang pemerintahan daerah, menyebutkan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tiga fungsi yaitu legislasi (pembentukan Perda Kabupaten/Kota), anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten/Kota.

1. Fungsi legislasi adalah pembentukan Perda kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan membahas peraturan daerah, menyetujui atau tidak menyetujui, mengajukan usul dan menyusun program pembentukan rancangan Perda Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota.

2. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
3. Fungsi pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

### **2.2.2 Tugas dan Wewenang DPRD**

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 154 tentang pemerintahan daerah, menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Memilih bupati/walikota;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan asli daerah meliputi :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer meliputi:
  - a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
    1. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (pajak, cukai dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).;
    2. Dana otonomi khusus;
    3. Dana keistimewaan; dan
    4. Dana desa.
  - b. Transfer antar daerah terdiri atas:
    1. Pendapatan bagi hasil; dan
    2. Bantuan keuangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, mencakup hibah (barang uang dan/jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja langsung dan tidak langsung.

1. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
2. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 1, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan didanai dari dan atas APBN.

### **2.3.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 3 ayat 4, mengemukakan APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi  
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan  
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan  
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### 4. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

#### 5. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### 2.4 Tinjauan Konsep

#### 2.4.1 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang bertujuan untuk menjamin suatu kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah disepakati (Dewi, 2011). Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 1 ayat 6 mengemukakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan pemerintahan tersebut pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan legislatif, yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah daerah sesuai dengan tugas, wewenang dan haknya. Penegasan tentang tugas dan wewenang DPRD untuk melaksanakan pengawasan keuangan daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 154 mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD provinsi/kabupaten/kota. Dalam melakukan tugas ini DPRD Kabupaten/Kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Tujuan dilakukan pengawasan ini adalah untuk meminimalisir kecurangan dalam penyalahgunaan keuangan daerah yang saat ini sering terjadi. Halim (2014:39) mengemukakan tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, untuk menjamin

dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mardiasmo (2004 : 78) mengemukakan jenis-jenis pengawasan keuangan daerah (APBD) yang menjamin akuntabilitas administrasi pemerintahan secara rutin dan usaha-usaha pembangunan, sebagai berikut:

1. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dijalankan oleh pengawas terhadap bawahannya dalam unit kerjanya. Pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaannya atau gambaran tentang organisasinya adalah tanggungjawab pemimpin organisasi. Setiap pimpinan lembaga pemerintah atau unit kerja structural dan fungsional seperti *project team*, komite, kelompok kerja memiliki tanggung jawab. Sehingga jika menemukan tindakan-tindakan yang menyimpang akan dilakukan tindakan koreksi dan selalu mempertahankan *good performance*.

2. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang kewajiban utamanya adalah mengawasi seperti Unit Pengawasan Internal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, Inspektorat Jendral Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Pengawasan legislatif

Pengawasan legislatif merupakan tugas pengawasan yang dijalankan oleh DPR dan DPRD. Berdasarkan UUD 1945, DPR memiliki kewajiban untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.

4. Pengawasan hukum

Pengawasan hukum adalah pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). MA memiliki wewenang dan kewajiban untuk menjalankan pengawasan atas pemerintah dalam bidang perundang-undangan.

#### 5. Pengawasan masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat seperti media masa, LSM, ormas dan lain-lain.

Unsur-unsur dalam pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan meliputi :

1. Keterlibatan anggota dewan dalam memberikan masukan saat perencanaan dan penetapan kebijakan umum APBD,
2. Peran anggota dewan saat penyusunan kebijakan APBD, keterlibatan anggota dewan dalam pengesahan APBD,
3. Keterlibatan anggota dewan dalam memantau pelaksanaan APBD, serta
4. Peran anggota dewan dalam mengevaluasi kinerja eksekutif dan meminta laporan pertanggungjawaban atas APBD yang telah dilaksanakan.

Semua pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan adalah untuk mendukung kinerja aparat pemerintahan serta selalu menjaga *good governance*. Pengawasan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menjadikan suatu daerah tersebut bersih dari tindak kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

#### 2.4.2 *Personal Background*

*Personal background* berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia seorang individu yang menjadi ujung tonggak sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007). Setiap anggota dewan yang terpilih mempunyai *personal background* yang berbeda-beda sebelum terpilih menjadi anggota DPRD. Dengan mengetahui lebih dalam *Personal background* anggota dewan akan membantu menilai kinerja para anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam pendekatan *behaviorisme*, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya,

melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga (Winarna dan Murni, 2007).

*Personal background* adalah latar belakang yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Latar belakang ini dapat mencerminkan kualitas seorang individu tersebut. Adanya *personal background* yang berbeda diantara para anggota dewan sedikit banyak akan memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dalam penelitian ini *personal background* tersebut memiliki beberapa indikator antara lain:

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pendidikan formal dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas. Semakin tinggi latar belakang pendidikan dari anggota dewan artinya semakin baik juga kinerja anggota dewan dalam mengawasi keuangan daerah.

2. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan berkaitan dengan jurusan yang diambil pada saat duduk dibangku perkuliahan. Latar belakang pendidikan dari anggota dewan dapat membantu dalam pekerjaannya sebagai pengawas keuangan daerah.

3. Pengalaman Organisasi

Pengalaman organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi yang pernah digeluti oleh anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan. Pengalaman organisasi ini umumnya terdiri dari LSM, non-LSM, organisasi politik, akademisi, organisasi masyarakat, dan lainnya. Pengalaman organisasi yang diperoleh baik sebelum dan sesudah menjadi anggota dewan juga berpengaruh pada kinerja anggota dewan. Semakin banyak pengalaman organisasi yang diperoleh maka dalam melaksanakan tugasnya anggota dewan akan memiliki keahlian dalam menangani kasus-kasus tertentu.

#### 4. Pengalaman di DPRD

Merupakan pengalaman anggota dewan menjadi anggota DPRD. Semakin lama seorang anggota dewan menjadi anggota DPRD akan memberikan pengalaman dan keahlian dalam menangani kasus-kasus tertentu.

#### 5. Lama Kerja di Pemerintahan

Lama kerja di pemerintahan merupakan lama waktu yang telah dijalani oleh seorang individu yang bekerja dalam lingkup pemerintahan. Waktu yang dijalani oleh seseorang dalam lingkup kerja di pemerintahan juga merupakan proses belajar seseorang yang akan memberikan pengalaman dalam suatu organisasi atau kelompok, dalam hal ini adalah lingkup pemerintahan. Lama kerja di pemerintahan akan membantu dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota dewan.

#### 6. Pelatihan tentang Keuangan Daerah

Pelatihan tentang keuangan daerah berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh anggota dewan yang berhubungan dengan keuangan daerah. Pelatihan juga merupakan proses belajar yang dapat meningkatkan intelektual dan pemahaman anggota dewan tentang keuangan daerah. Semakin sering mengikuti pelatihan tentang keuangan daerah maka akan menambah pengetahuan anggota dewan tentang keuangan daerah dan akan mengoptimalkan tugasnya dalam mengawasi keuangan daerah.

### **2.4.3 Pengetahuan Dewan tentang Anggaran**

Pengetahuan dewan tentang anggaran yaitu pengetahuan dewan terhadap mekanisme anggaran mulai dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata kelola keuangan daerah, proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban (Amalia, 2013).

1. Proses perencanaan APBD meliputi rancangan kerja eksekutif selama satu periode.
2. Proses penyusunan yaitu pemerintah daerah menyusun rancangan kerja dan diberikan kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan.

3. Tahap pelaksanaan dimana pemerintah daerah menjalankan APBD yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan daerah yang telah ditetapkan pada tahap ini DPRD bertanggungjawab penuh untuk melakukan pengawasan atas jalannya pelaksanaan APBD.
4. Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah daerah memberikan laporan hasil kinerja selama satu periode kepada DPRD selaku pengawas keuangan daerah dan ditujukan kepada Gubernur.

Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat erat kaitannya dengan kinerjanya sebagai pengawas keuangan daerah. Pengetahuan ini dapat membantu anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini dapat diperoleh dari pelatihan dan seminar yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dewan tentang anggaran.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota DPRD. Fungsi penganggaran memberikan hak kepada anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif dan memberikan wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dibuat. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dengan kata lain DPRD memegang kontrol penuh agar kinerja dan pelaksanaan APBD dapat berjalan sesuai rencana dan tidak ada kecurangan. Untuk melaksanakan tugasnya anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran di daerah. Anggota dewan juga berhak mendapat laporan pertanggungjawaban dari Bupati/Walikota atas kinerja selama tahun berjalan dan berhak memperoleh laporan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi lebih ketika didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan. Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat membantu dalam pengawasan keuangan daerah untuk mendeteksi apabila ada kecurangan dan kebocoran APBD. Dengan didukung pengetahuan dewan tentang anggaran yang luas dalam mengawasi kinerja eksekutif akan lebih maksimal sehingga pelaksanaan kegiatan daerah dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh <i>Personal Background</i> , Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan <i>Political Culture</i> Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Se-Keresidenan Cirebon) (Wibowo, 2012)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Personal background</i></li> <li>2. <i>Political culture</i></li> <li>3. Pengetahuan dewan tentang Anggaran</li> <li>4. Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar belakang pribadi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, strata pendidikan, dan pengalaman politik tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.</li> <li>2. <i>Political culture</i> tidak mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.</li> <li>3. Pengetahuan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan negatif</li> </ol>

			terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
2.	Pengaruh <i>personal background, political background</i> dan Pengetahuan dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Anggaran DPRD se-Eks Karisidenan Surakarta) (Handoyo, 2011)	<p>1. <i>Personal background</i></p> <p>2. <i>Political background</i></p> <p>3. Pengetahuan dewan tentang Anggaran</p> <p>4. Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah</p>	<p>1. <i>Personal background</i> yang terdiri dari usia, bidang pendidikan dan latar belakang pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.</p> <p>2. <i>Political background</i> yang terdiri dari pengalaman di DPRD, pengalaman politik dan asal komisi tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.</p> <p>3. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.</p>
3.	Pengaruh <i>Personal Background, Political Background,</i>	<p>1. <i>Personal background</i></p> <p>2. <i>Political Background</i></p> <p>3. Pemahaman Regulasi</p>	<p>1. Tingkat pendidikan dan relevansi pendidikan berpengaruh negatif dan</p>

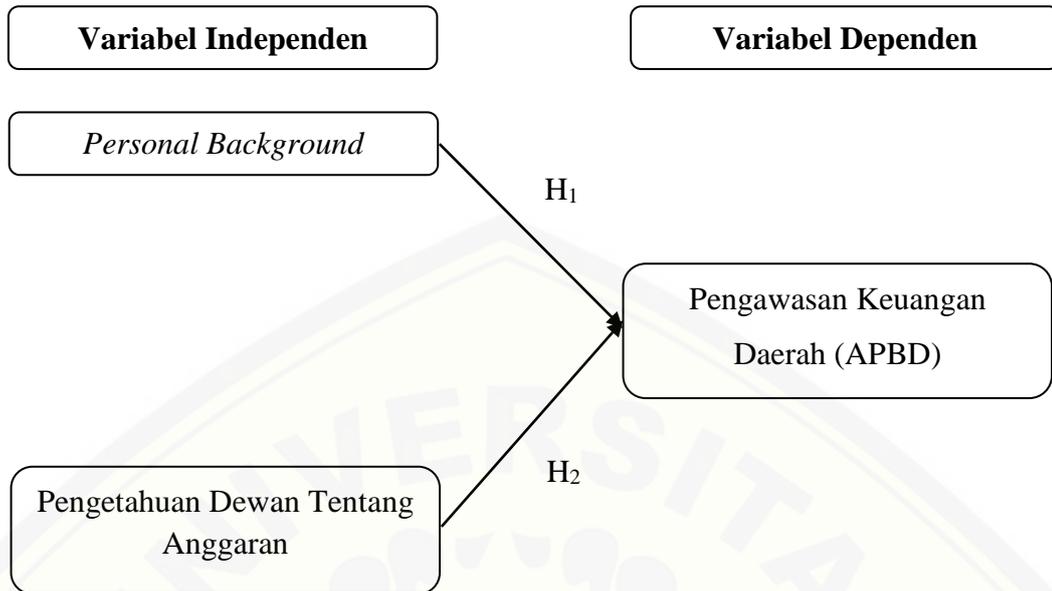
	<p>Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Boyolali) (Kartikasari, 2012)</p>	<p>4. Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan keuangan daerah</p>	<p>tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 2.Relevansi latar belakang pekerjaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 3.Pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, asal komisi anggaran, dan pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.</p>
4.	<p>Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik</p>	<p>1. Latar Belakang Anggota Dewan 2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 3. Transparansi Kebijakan Publik</p>	<p>1. Latar belakang anggota dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 2. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).</p>

	(Studi Kasus Pada Kantor DPRDKabupaten Tabanan) (Rosita,dkk, 2014)		3. Tranparansi kebijakan publik sebagai Variabel Moderating berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara <i>political background</i> dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
5.	Pengaruh Latar Belakang Personal, Latar Belakang Politik, Budaya Politik Dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Karanganyar) (Nuarta, 2014)	1.Latar belakang personal 2.Latar belakang politik 3.Budaya politik 4.Pengetahuan dewan tentang anggaran 5.Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)	1.Latar belakang personal berpengaruh tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 2.Latar belakang politik berpengaruh tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 3.Budaya politik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 4.Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.
6.	Pengaruh <i>Personal Background, Political</i>	1. <i>Personal background</i> 2. <i>Political Background</i>	1. <i>Personal background</i> dan <i>political background</i>

<p><i>Background</i> dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006) (Winarna dan Murni, 2007)</p>	<p>3. Pengetahuan dewan tentang anggaran 4. Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan keuangan daerah</p>	<p>secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 2. Pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawan keuangan daerah.</p>
---	---	---

## 2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap variabel dependen yang berupa pengawasan keuangan daerah (APBD). Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas dapat disusun kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

## 2.7 Hipotesis Penelitian

### 2.7.1 Pengaruh *Personal Background* terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Teori peran menyebutkan bahwa seorang individu dapat berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dijalani. Setiap peran berhubungan dengan identitas yang menggambarkan individu tersebut dalam bertindak dalam suatu organisasi atau kelompok. Kaitannya dengan tugas seorang anggota dewan dalam mengawasi keuangan daerah, anggota dewan harus berperilaku sesuai peran yang sedang dijalani. Artinya, anggota dewan harus berperilaku sesuai dengan tanggungjawab dan tugas yang sedang dijalankan. Dalam menjalankan tugasnya seorang anggota dewan dipengaruhi oleh *personal background* setiap individu. *Personal background* tersebut meliputi: tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman menjabat sebagai anggota dewan, lama bekerja di pemerintahan dan pelatihan tentang keuangan daerah. Semakin baik *personal background* dari anggota dewan maka semakin besar kapasitas yang diberikan dalam melaksanakan tugasnya mengawasi keuangan

daerah. Sehingga pengawasan keuangan daerah dapat berjalan dengan maksimal dan mendorong tercapainya *good governance*.

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya hubungan yang terjadi antara prinsipal dan agen. Kaitannya dengan dengan akuntansi sektor publik berarti masyarakat bertindak sebagai *principal* yang memberikan amanah kepada anggota dewan selaku *agent* untuk menjalankan tugasnya mengawasi kinerja keuangan daerah. Dalam pendekatan keagenan apabila dikaitkan dengan pemerintahan daerah, pemerintah daerah atau eksekutif merupakan agen dan DPRD atau legislatif merupakan prinsipal. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menggunakan APBD sesuai dengan peraturan daerah dan diawasi oleh dewan. Pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi sistem individu secara pribadi (Winarna dan Murni, 2007). *Personal background* erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Sehingga perlu ditelaah lebih dalam tentang *personal background* dari anggota dewan agar kinerja yang dihasilkan juga maksimal.

Beberapa penelitian sebelumnya yang menguji hubungan *personal background* dengan kinerja anggota DPRD dalam mengawasi keuangan daerah (APBD), seperti yang dilakukan oleh Handoyo (2011) dan Rosita,dkk (2014) menyimpulkan bahwa *personal background* seperti strata pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan pengalaman organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>1</sub> : *Personal Background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).**

### **2.7.2 Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

Berdasarkan pendekatan teori peran bahwa seorang individu dapat berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dijalani. Kaitannya dengan tugas seorang anggota dewan, anggota dewan harus memahami perannya dalam hal ini peran yang dimaksud adalah tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas

keuangan daerah (APBD). Untuk menjalankan tugasnya dalam mengawasi keuangan daerah dengan baik anggota dewan harus mengetahui mekanisme anggaran mulai dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata kelola keuangan daerah, proses penyusunan anggaran, sampai pada tahap pertanggungjawaban. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat erat kaitannya dengan kinerjanya sebagai pengawas keuangan daerah. Semakin luas pemahaman tentang anggaran oleh anggota dewan maka semakin baik pula kualitas kinerja anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan pengetahuan anggaran yang luas maka anggota dewan dapat mengontrol jalannya APBD dengan baik dan meminimalisir terjadi kecurangan.

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya hubungan yang terjadi antara prinsipal dan agen. Kaitannya dengan dengan akuntansi sektor publik berarti masyarakat bertindak sebagai *principal* yang memberikan amanah kepada anggota dewan selaku *agent* untuk menjalankan tugasnya mengawasi kinerja keuangan daerah. Dalam pendekatan keagenan apabila dikaitkan dengan pemerintahan daerah, pemerintah daerah atau eksekutif merupakan agen dan DPRD atau legislatif merupakan prinsipal. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas keuangan daerah seorang anggota dewan harus memiliki pengetahuan tentang anggaran. Pengetahuan tentang anggaran dapat mendukung tugasnya dalam mengawasi jalannya APBD sehingga APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam penelitian sebelumnya yang menguji hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan kinerja anggota DPRD dalam mengawasi keuangan daerah (APBD), seperti yang dilakukan oleh Kinarsih (2013) dan Handoyo (2011) menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>2</sub> :Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh positif dan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).**

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi dengan angka (Arikunto, 2006 dalam Amalia, 2013). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dan observasi yang dilakukan peneliti langsung di lingkungan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data subyek yaitu jenis data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian/responden (Indriantoro dan Supomo, 2014:146).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden (Indriantoro dan Supomo, 2014: 145).

### 3.3 Populasi dan Sampel

Indriantoro dan Supomo (2014:115) mengemukakan populasi (*population*) adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2014-2019. Peneliti menggunakan metode pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota dewan yang berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei dan observasi yang dilakukan langsung dengan membagikan kuesioner di lingkungan DPRD Kabupaten Banyuwangi. Kuesioner tersebut berisi tentang daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Metode penyebaran kuesioner adalah dengan menggunakan *Personally Administrated Quetionaires*, yaitu penggunaan kuesioner yang disampaikan dan dikumpulkan oleh peneliti dengan menemui responden secara langsung, sehingga peneliti dapat memberikan penjelasan seperlunya kepada responden mengenai hal-hal yang belum dimengerti oleh responden (Dewi, 2011).

### 3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

#### 3.5.1 Variabel Penelitian

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:63), Tipe-tipe variable dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi variabel dalam hubungan antar variabel, yaitu: Variabel Independen (*Independent Variable*), Variabel dependen (*Dependent Variable*).

1. Variabel Dependen (*Y*)

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Yang menjadi variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah (*Y*).

2. Variabel Independen (*X*)

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran (*X*).

### 3.5.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Indriantoro dan Bambang (2014:61) menjelaskan yang disebut variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel merupakan mediator antara *contract* yang abstrak dengan fenomena yang nyata.

Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang bertujuan untuk menjamin suatu kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah disepakati (Dewi, 2011). Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dilakukan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan sampai proses pertanggungjawaban APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam penelitian ini, kuesioner penelitian untuk mengukur variabel pengawasan keuangan daerah yang digunakan mengadopsi dari penelitian Hartono (2015). Kuesioner yang diajukan terdiri dari 11 pertanyaan yang terdiri dari keterlibatan dan peran anggota dewan dalam menyusun, mengawasi dan mengevaluasi jalannya APBD. Variabel pengawasan keuangan daerah diukur dengan menggunakan *likert scale* (skala likert). Skala likert merupakan metode pengukuran yang berisi beberapa alternatif kategori pendapat yang memungkinkan bagi responden untuk memberikan alternatif penilaian (Indriantoro dan Supomo, 2014:65) yang sesuai dengan sikap dan tindakan yang dilakukan atas pertanyaan yang diajukan. Augustin dan Kristaung (2013:65) menyatakan pengukuran variabel dengan skala likert 1 sampai 5, yaitu 1= Sangat Tidak Setuju (STS); 2= Tidak Setuju (TS); 3= Tidak tahu (TT); 4= Setuju (S); dan 5= Sangat Setuju (SS).

## 2. *Personal Background*

*Personal background* adalah latar belakang yang berkaitan dengan sumber daya manusia (Winarna dan Murni, 2007). *Personal background* dalam penelitian ini adalah pendapat anggota dewan mengenai latar belakang yang dapat mendukung pengawasan keuangan daerah. Latar belakang tersebut berupa tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Kuesioner yang diajukan terdiri dari 10 pertanyaan yang bersumber dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia (2013) pertanyaan tersebut meliputi pengaruh jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, masa jabatan dan pengalaman kerja di DPRD dari anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas keuangan daerah (APBD). Dari kuesioner yang diajukan diharapkan mampu menggambarkan pengaruh *personal background* terhadap kinerja DPRD sebagai pengawas keuangan daerah. Dalam penelitian ini *personal background* dihitung menggunakan skala likert yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden, responden akan menjawab dari Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= TT (Tidak Tahu), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju).

## 3. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan yaitu pengetahuan dewan terhadap mekanisme anggaran yaitu mulai proses penyusunan anggaran, sampai pada tahap pertanggungjawaban (Amalia, 2013). Kuesioner yang diajukan oleh peneliti terdiri dari 11 pertanyaan yang mengadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia (2013). Kuesioner yang diajukan meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mekanisme anggaran mulai tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= TT (Tidak Tahu), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju).

### 3.6 Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari responden kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan alat statistik sebagai berikut:

#### 3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Indriantoro dan Bambang (2014:170), mengemukakan statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan alat statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai identitas responden, seperti jenis kelamin, jabatan, lama bekerja di DPRD, strata pendidikan dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian.

#### 3.6.2 Uji Kualitas Data

Kesimpulan penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu: validitas dan reliabilitas. Artinya, suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang *valid dan kurang reliable*.

##### 3.6.2.1 Uji Validitas

Hubungan dengan kualitas data, penelitian yang menggunakan data primer, seperti kuesioner, harus memperhatikan tiga kriteria, yaitu valid, andal dan praktis. Uji validitas berkaitan dengan apakah kita mengukur apa yang seharusnya diukur (Augustine dan Kristaung, 2013:68). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner.

### 3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran tersebut diulangi dua kali atau lebih. Uji reliabilitas berkaitan dengan konsistensi, akurasi, dan prediktabilitas suatu alat ukur (Augustine dan Kristaung, 201:70). Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal apabila jawaban pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu.

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak, karena untuk melakukan uji-t harus mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Penggunaan model regresi untuk prediksi akan menghasilkan kesalahan (residu), yakni selisih antara data aktual dengan data hasil peramalan. Residu yang ada seharusnya berdistribusi normal. Pada SPSS, akan digunakan fasilitas Histogram dan Normal Probability Plot untuk mengetahui kenormalan residu dari model regresi. Dalam penelitian ini dalam mengukur normalitas data, peneliti menggunakan Histogram dan normal probability plot (Santosa, 2014: 349).

#### 3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana antara dua variabel bebas atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau tinggi tetapi tidak sempurna. Konsekuensinya, apabila terdapat multikolinieritas sempurna, koefisien regresi tidak tentu dan kesalahan standar (standard error) tidak terhingga. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dari nilai *tolerance* dan lawannya variace inflation factor (VIF).

Santosa (2014:351) menjelaskan bahwa suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas jika:

1. Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1
2. Mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1

Dimana Tolerance =  $1/VIF$  atau bisa juga  $VIF = 1/Tolerance$ .

### 3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana variasi dari residual (error) pada model regresi tidak konstan atau berubah-ubah. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Santosa (2014:352) menjelaskan bahwa untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar, dan menyempit) maka akan terjadi masalah heterokedasitas.
- 2) Jika tidak ada pola jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu-sumbu, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

Indriantoro dan Bambang (2014:202) menjelaskan penggunaan metode statistik untuk penelitian terhadap satu variabel penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dapat ditentukan berdasarkan tujuan studi (masalah atau pertanyaan penelitian) dan skala pengukuran variabel yang bersangkutan. Uji hipotesis terhadap satu variabel umumnya berupa uji perbedaan nilai sampel dengan populasi atau nilai dari data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis).

Berikut uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini:

#### 3.6.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi linear sederhana yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Regresi linear berganda digunakan untuk membuat hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas.

Model regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pengawasan keuangan Daerah (APBD)

$X_1$  = *Personal Background*

$X_2$  = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

$\beta$  = Koefisien Regresi

e = error

#### 3.6.4.2 Uji Signifikan Simultan (F)

Uji- F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama. Dengan kata lain, Uji-F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara serempak dapat mempengaruhi variabel terikat. Signifikan Uji-F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{Hitung}$  dengan  $F_{Tabel}$ . (Ghozali, 2013:98).

Santosa (2014:356) menyatakan bahwa ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikansi). Hal ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara simultan ketiga variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.6.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi (*goodness of fit*) yang dinotasikan dengan  $R^2$  merupakan iktisar yang menyatakan bahwa seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Koefisien determinasi bertujuan untuk menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung (Santosa, 2014:99). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq \text{Koefisien Determinasi } R^2 \leq 1$ ) atau antara 0% sampai dengan 100%. Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

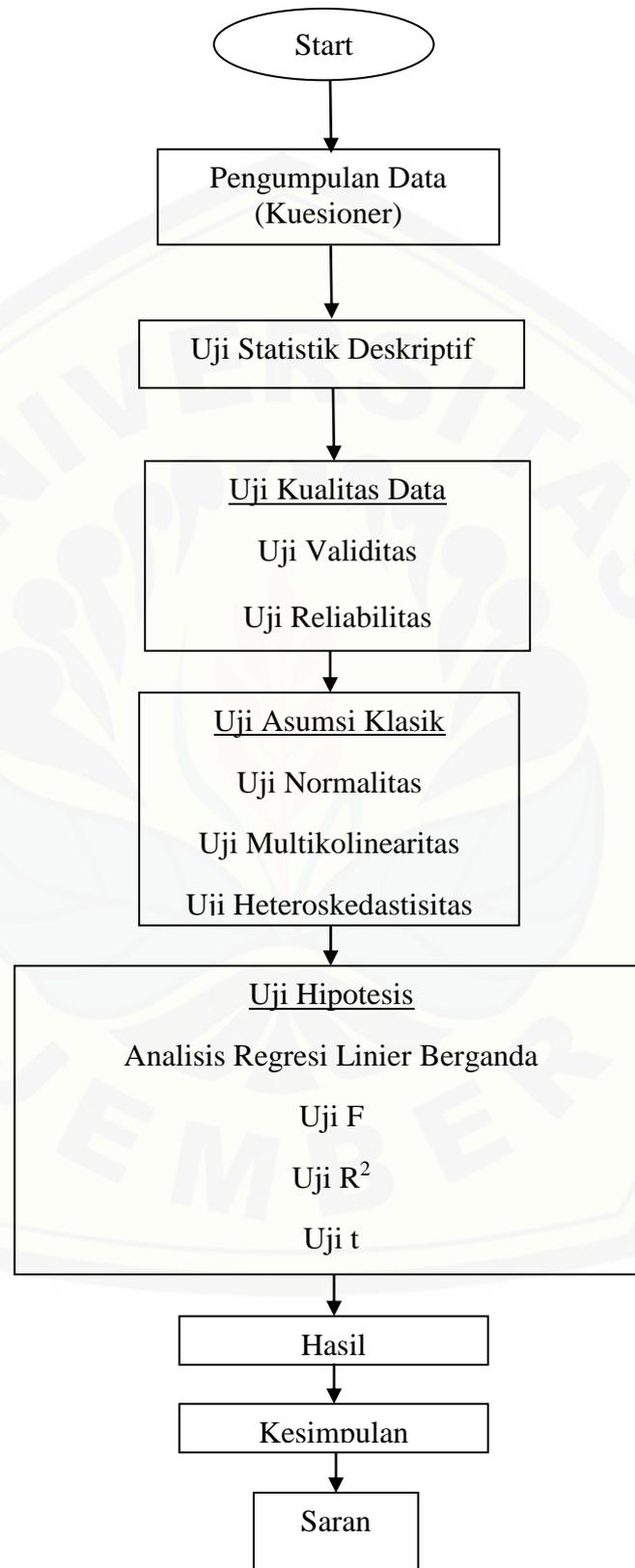
### 3.6.4.4 Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (variabel bebas  $X^1, X^2$ ) secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (Variabel terikat Y). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Ghozali (2013:98) menjelaskan bahwa penolakan dan penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 5% maka hipotesis diterima. Artinya secara partial variabel *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 5% maka hipotesis ditolak. Artinya secara partial variabel *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

### 3.7 Kerangka Pemecah Masalah



## BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

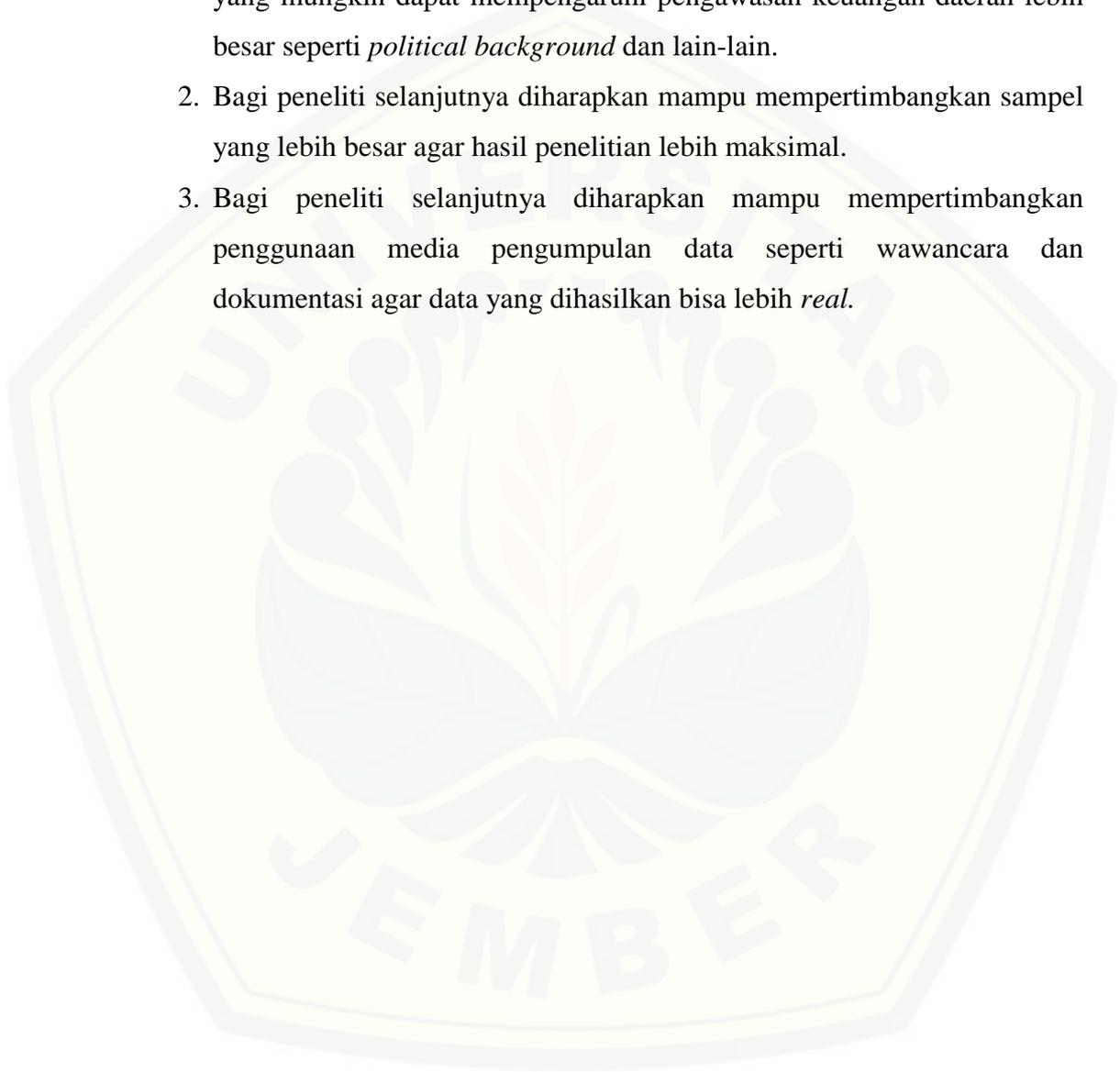
1. Hasil pengujian uji parsial menunjukkan bahwa *personal background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). *Personal background* berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan kapabilitas anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Artinya semakin baik *personal background* dari anggota dewan maka kapabilitas yang diberikan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) juga akan semakin besar.
2. Hasil pengujian uji parsial menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Artinya anggota dewan tidak selalu paham tentang anggaran namun rutinitas kerja dan pengalaman kerja menjadi media pembelajaran yang lebih efektif dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

### 5.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan variabel *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran yang hanya mempengaruhi pengawasan keuangan (APBD) daerah sebesar 23%, sehingga ada variabel lain yang dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Sampel yang ada dalam penelitian ini hanya 25 orang.
3. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai media pengumpulan data.

### 5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah lebih besar seperti *political background* dan lain-lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mempertimbangkan sampel yang lebih besar agar hasil penelitian lebih maksimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mempertimbangkan penggunaan media pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi agar data yang dihasilkan bisa lebih *real*.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, Fitri. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo)". Skripsi. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Augustine, Yvonne dan Kristaung, Robert. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Dewi, Mustika. 2011. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, 7th ed.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Godfrey, dkk. 2010. *Accounting Theory*. 7<sup>th</sup>ed. John Wiley & Sons, Inc. (GHT)
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Halim dan Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoyo, Sulih. 2011. Pengaruh *Personal Background, Political Background* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Anggaran DPRD Se-Eks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Ilmiah* 2011.
- Hartono, Ramang. 2015. "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Kabupaten Jember)". Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Indriantoro, Nur dan Sopomo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Edisi Pertama). Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Kartikasari, Dewi. 2012. Pengaruh *personal background, political background*, pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali). *Accounting Analysis Journal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang*. ISSN 2252-6765.

- Kinarsih. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) : Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Kabupaten Sragen). *Artikel Ilmiah Universitas Muhamadiyah Surakarta Tahun 2013*.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nuarta, Mutia. 2014. “Pengaruh Latar Belakang Politik Budaya Politik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD ) Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Karanganyar”. Naskah Publikasi. Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 *tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010 *tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Pramita dan Andriyani, 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto Universitas Jendral Soedirman Tahun 2010*.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2005. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 *tentang Sistem Perencanaan Perimbangan Nasional*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Rosita, dkk. 2014. Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi

Kasus Pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan). *E-Journal S1 Akuntansi Pendidikan Ganesha (Volume 2 No.1 Tahun 2014)*.

Santosa, Singgih. 2014. *SPSS 22 from Essential to Export Skills*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Wibowo, Arie. 2012. Pengaruh *Personal Background*, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, dan *Political Culture* terhadap Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi Volume 13 No.1, Halaman 44-52 Januari 2012*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Widyaningsih, Aristanti. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Riset Akuntansi Vol. 2 No.1*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI.

Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. Pengaruh *Personal Background* dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Penelitian Simposium Nasional Akuntansi X*. Universitas Sebelas Maret.

Wiyana, Anim. 2011. Pengaruh *Personal Background* dan *Political Background* terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Volume 1 Nomor 2 Tahun 2011*. Jurusan Akuntansi STIEM Bongaya.

## PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth : Bapak/Ibu

di Tempat

Hal: Permohonan untuk menjadi Responden

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan skripsi pada program Sarjana Akuntansi Universitas Jember, maka peneliti mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dalam rangka penulisan skripsi, maka peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner.

Jawaban dari kuesioner ini akan peneliti gunakan sebagai keperluan untuk menyusun skripsi yang berjudul, "**PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND* DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Banyuwangi)**".

Sebagaimana penelitian ilmiah, kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dalam memberikan penilaian dijamin tidak akan membawa konsekuensi yang merugikan. Atas kesediaannya dalam mengisi kuesioner ini, diucapkan terima kasih.

Jember, 2016

Yang membuat pernyataan,

Choyrun Nisa

120810301085

**KUESIONER PENELITIAN****Identitas Responden**

Mohon diisi dengan memberikan tanda (X) pada pernyataan pilihan, serta jawab secara singkat dan jelas pada pernyataan isian.

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : a. Laki-laki  
b. Perempuan
3. Usia : a.  $\leq 30$  tahun  
b. 31-40 tahun  
c. 41-50 tahun  
d.  $\geq 51$  tahun
4. Pendidikan Terakhir : 1. SMA/Sederajat 4. S1 (Sarjana)  
2. D1 5. S2 (Master)  
3. D3  
Sebutkan bidang pendidikan.....
5. Lama Kerja di Pemerintahan (termasuk menjadi anggota DPRD) : a. 1-3 tahun  
b. 4-5 tahun  
c. 6-7 tahun  
d. 8-10 tahun  
e.  $< 10$  tahun
6. Pengalaman Organisasi : a. 1-3 tahun  
b. 4-5 tahun  
c. 6-7 tahun  
d. 8-10 tahun  
e.  $< 10$  tahun
7. Jabatan di DPRD : .....
8. Keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah :  
: a. Belum pernah  
b. 1 kali  
c. 2 kali  
d. 3 kali  
e. 4 kali atau lebih

**Petunjuk Pengisian**

Berilah tanda (X) pada kolom alternatif yang tersedia untuk jawaban yang paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)                      S : Setuju (Skor 4)

TS : Tidak Setuju (Skor 2)                                SS : Sangat Setuju (Skor 5)

TT : Tidak Tahu (Skor 3)

**A. Personal Background (X<sub>1</sub>)**

No.	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Jenjang pendidikan Bapak/Ibu mendukung dalam pelaksanaan tugas.					
2.	Latar belakang pendidikan Bapak/Ibu dapat membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.					
3.	Pendidikan Bapak/Ibu bermanfaat dalam menangani kasus-kasus tertentu.					
4.	Pengalaman Organisasi Bapak/Ibu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Bapak/Ibu saat ini.					
5.	Pengalaman organisasi Bapak/Ibu mempengaruhi keahlian dalam melaksanakan tugas.					
6.	Semakin lama Bapak/Ibu mengikuti suatu suatu organisasi, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan.					
7.	Pengalaman di DPRD menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas.					
8.	Masa kerja Bapak/Ibu di DPRD memberikan pengalaman dalam melaksanakan tugas.					
9.	Bapak/Ibu telah mengikuti berbagai pelatihan tentang keuangan daerah.					
10.	Sertifikasi dari pelatihan keuangan daerah yang diperoleh Bapak/Ibu					

dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas.					
--	--	--	--	--	--

### B. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (X<sub>2</sub>)

No.	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Anggaran publik mendapatkan otorisasi legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut .					
2.	Prinsip anggaran yang bersifat komprehensif tidak memasukkan dana <i>non-budgetair</i> .					
3.	Estimasi anggaran tidak memasukkan cadangan dana yang tersembunyi.					
4.	APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintahan daerah.					
5.	Penyusunan dan penetapan rancangan APBD merupakan pertanggung jawaban DPRD.					
6.	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk Pemerintah Daerah Provinsi ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.					
7.	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditujukan kepada Gubernur.					
8.	Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD.					
9.	DPRD membahas Kebijakan Umum APBD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.					
10.	Dalam menyusun APBD, Pemda dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara.					
11.	Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern sangat					

	diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran.					
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Amalia (2013)

### C. Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y)

No.	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat perencanaan dan penetapan kebijakan umum APBD.					
2.	Anggota dewan berperan saat penyusunan arah dan kebijakan APBD.					
3.	Bagi anggota dewan aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD.					
4.	Anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD.					
5.	Anggota dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disahkan.					
6.	Anggota dewan merasa pengesahan APBD sudah memenuhi azas transparansi.					
7.	Anggota dewan terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD.					
8.	Anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan/bulanan yang dibuat eksekutif.					
9.	Anggota dewan meminta keterangan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota.					
10.	Anggota dewan menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalaan.					
11.	Seperlunya saja Anggota dewan meminta keterangan atas LPJ APBD yang disampaikan Bupati/Walikota.					

Sumber : Hartono (2015)

### Statistik Deskriptif Data Responden

#### Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	19	76,0	76,0	76,0
	perempuan	6	24,0	24,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

#### Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	32	1	4,0	4,0	4,0
	40	3	12,0	12,0	16,0
	42	3	12,0	12,0	28,0
	43	2	8,0	8,0	36,0
	44	4	16,0	16,0	52,0
	45	2	8,0	8,0	60,0
	46	1	4,0	4,0	64,0
	48	2	8,0	8,0	72,0
	49	2	8,0	8,0	80,0
	51	3	12,0	12,0	92,0
	56	1	4,0	4,0	96,0
	64	1	4,0	4,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

#### Strata Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/Sederajat	1	4,0	4,0	4,0
	D3	2	8,0	8,0	12,0
	S1	17	68,0	68,0	80,0
	S2	5	20,0	20,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

**Lama Kerja di Pemerintahan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4-5 tahun	2	8,0	8,0	8,0
	6-7 tahun	6	24,0	24,0	32,0
	8-10 tahun	9	36,0	36,0	68,0
	<10 tahun	8	32,0	32,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

**Pengalaman Organisasi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4-5 TAHUN	4	16,0	16,0	16,0
	6-7 TAHUN	9	36,0	36,0	52,0
	8-10TAHUN	6	24,0	24,0	76,0
	<10 TAHUN	6	24,0	24,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

**Jabatan di DPRD**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	wakil ketua DPRD	3	12,0	12,0	12,0
	Ketua dan wakil ketua komisi-komisi	6	24,0	24,0	36,0
	Anggota	16	64,0	64,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

**Fraksi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PDI-P	7	28,0	28,0	28,0
	PKB	3	12,0	12,0	40,0
	GOLKAR-PAN	5	20,0	20,0	60,0
	GERINDRA-PKS	3	12,0	12,0	72,0
	DEMOKRAT	2	8,0	8,0	80,0
	PPP	2	8,0	8,0	88,0
	HANURA-NASDEM	3	12,0	12,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

**Statistik Deskriptif *Personal Background*****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
ST	25	1	5	4,00	,163	,816
PO	25	2	5	3,56	,209	1,044
LK	25	2	5	2,80	,191	,957
PKD	25	1	5	2,20	,245	1,225
Valid N (listwise)	25					

**Keterangan :**

ST : Strata Pendidikan

PO : Pengalaman Organisasi

LK : Lama Kerja di pemerintahan termasuk menjadi anggota DPRD

PKD : Pelatihan Keuangan Daerah

**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
PB	25	25	40	35,32	,946	4,732
PD	25	22	44	36,32	1,449	7,244
PKD	25	22	49	35,56	1,441	7,206
Valid N (listwise)	25					

**Keterangan :**

PB : *Personal Background*

PD : Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

PKD : Pengawasan Keuangan Daerah



	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X10	Pearson Correlation	-,052	,130	-,052	1,000**	-,053	,097	,818**	-,006	-	1	,570**
	Sig. (2-tailed)	,805	,534	,805	,000	,800	,644	,000	,978	,595**		,003
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
TOTAL	Pearson Correlation	,707**	,420*	,707**	,570**	,662**	,411*	,416*	,721**	-	,570**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,037	,000	,003	,000	,041	,039	,000	,650**	,003	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).





X7	Pearson Correlation	,335	,254	1,000*	,335	,465*	,360	1	,465*	,799*	,491*	,465*	,730**
	Sig. (2-tailed)	,101	,220	,000	,101	,019	,077		,019	,000	,013	,019	,000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X8	Pearson Correlation	,449*	,357	,465*	,449*	1,000*	,272	,465*	1	,666*	,404*	1,000*	,802**
	Sig. (2-tailed)	,024	,080	,019	,024	,000	,188	,019		,000	,045	,000	,000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X9	Pearson Correlation	,559*	,476*	,799**	,559**	,666**	,546*	,799**	,666**	1	,704*	,666**	,908**
	Sig. (2-tailed)	,004	,016	,000	,004	,000	,005	,000	,000		,000	,000	,000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X10	Pearson Correlation	,801*	,377	,491*	,801**	,404*	,647*	,491*	,404*	,704*	1	,404*	,792**
	Sig. (2-tailed)	,000	,063	,013	,000	,045	,000	,013	,045	,000		,045	,000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X11	Pearson Correlation	,449*	,357	,465*	,449*	1,000*	,272	,465*	1,000*	,666*	,404*	1	,802**
	Sig. (2-tailed)	,024	,080	,019	,024	,000	,188	,019	,000	,000	,045		,000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
TOTAL	Pearson Correlation	,760*	,527*	,730**	,760**	,802**	,569*	,730**	,802**	,908*	,792*	,802**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,007	,000	,000	,000	,003	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



X7	Pearson Correlation	,160	,505*	-,112	1,000**	,160	,580**	1	-,112	,580**	,185	-,112	,497*
	Sig. (2-tailed)	,443	,010	,593	,000	,443	,002		,593	,002	,375	,593	,011
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X8	Pearson Correlation	,273	,477*	1,000**	-,112	,273	,402*	-,112	1	,402*	,241	1,000**	,643**
	Sig. (2-tailed)	,187	,016	,000	,593	,187	,047	,593		,047	,246	,000	,001
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X9	Pearson Correlation	,393	,916*	,402*	,580**	,393	1,000**	,580**	,402*	1	,104	,402*	,846**
	Sig. (2-tailed)	,052	,000	,047	,002	,052	,000	,002	,047		,620	,047	,000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X10	Pearson Correlation	,731**	,226	,241	-,185	,731**	,104	-,185	,241	,104	1	,241	,432*
	Sig. (2-tailed)	,000	,278	,246	,375	,000	,620	,375	,246	,620		,246	,031
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
X11	Pearson Correlation	,273	,477*	1,000**	-,112	,273	,402*	-,112	1,000**	,402*	,241	1	,643**
	Sig. (2-tailed)	,187	,016	,000	,593	,187	,047	,593	,000	,047	,246		,001
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
TOTAL	Pearson Correlation	,701**	,893*	,643**	,497*	,701**	,846**	,497*	,643**	,846**	,432*	,643**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,011	,000	,000	,011	,001	,000	,031	,001	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Hasil Uji Reliabilitas**

**Variabel X<sub>1</sub> (Personal Background )**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,530	10

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	31,76	16,690	,573	,403
X2	31,24	19,607	,243	,500
X3	31,76	16,690	,573	,403
X4	32,00	17,417	,364	,458
X5	31,88	17,110	,515	,421
X6	31,36	19,157	,168	,522
X7	32,20	19,167	,183	,517
X8	31,80	16,750	,599	,400
X9	31,88	30,860	-,763	,747
X10	32,00	17,417	,364	,458

**Variabel X<sub>2</sub> (Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,918	11

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	33,16	43,390	,700	,910
X2	33,24	46,107	,421	,924
X3	32,96	43,707	,662	,912
X4	33,16	43,390	,700	,910
X5	33,00	42,833	,750	,907
X6	32,92	46,410	,485	,920
X7	32,96	43,707	,662	,912
X8	33,00	42,833	,750	,907
X9	32,80	42,333	,884	,901
X10	33,00	43,417	,742	,908
X11	33,00	42,833	,750	,907

**Variabel Y (Pengawasan Keuangan Daerah)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,872	11

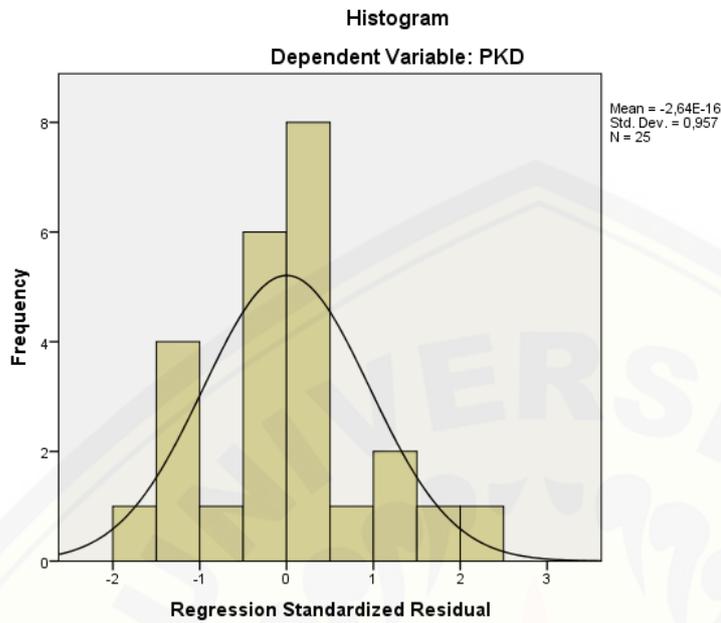
**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	32,56	43,173	,623	,857
X2	32,56	41,007	,862	,842
X3	32,16	43,973	,554	,862
X4	32,08	45,327	,371	,876
X5	32,56	43,173	,623	,857
X6	32,48	40,760	,799	,844
X7	32,08	45,327	,371	,876
X8	32,16	43,973	,554	,862
X9	32,48	40,760	,799	,844
X10	32,32	46,643	,308	,879
X11	32,16	43,973	,554	,862

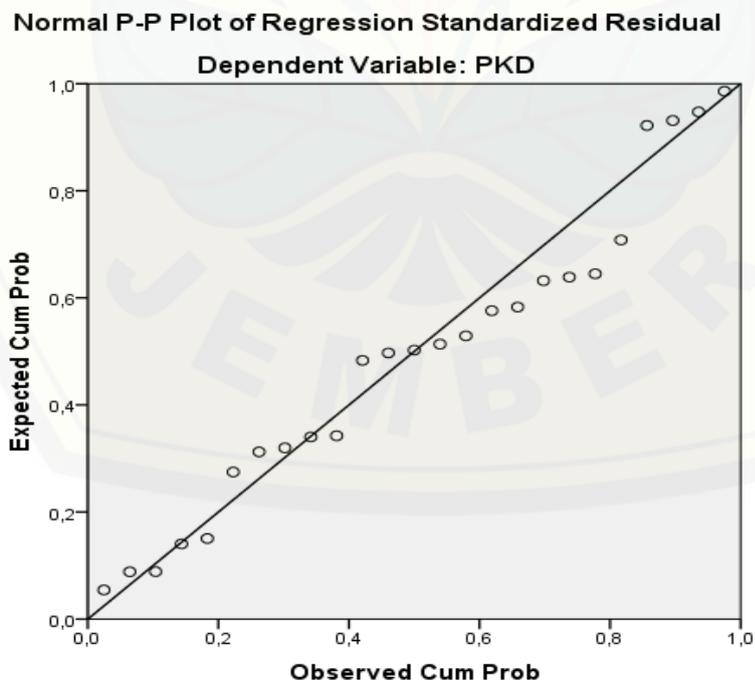
Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Histogram



(Probability Plot)



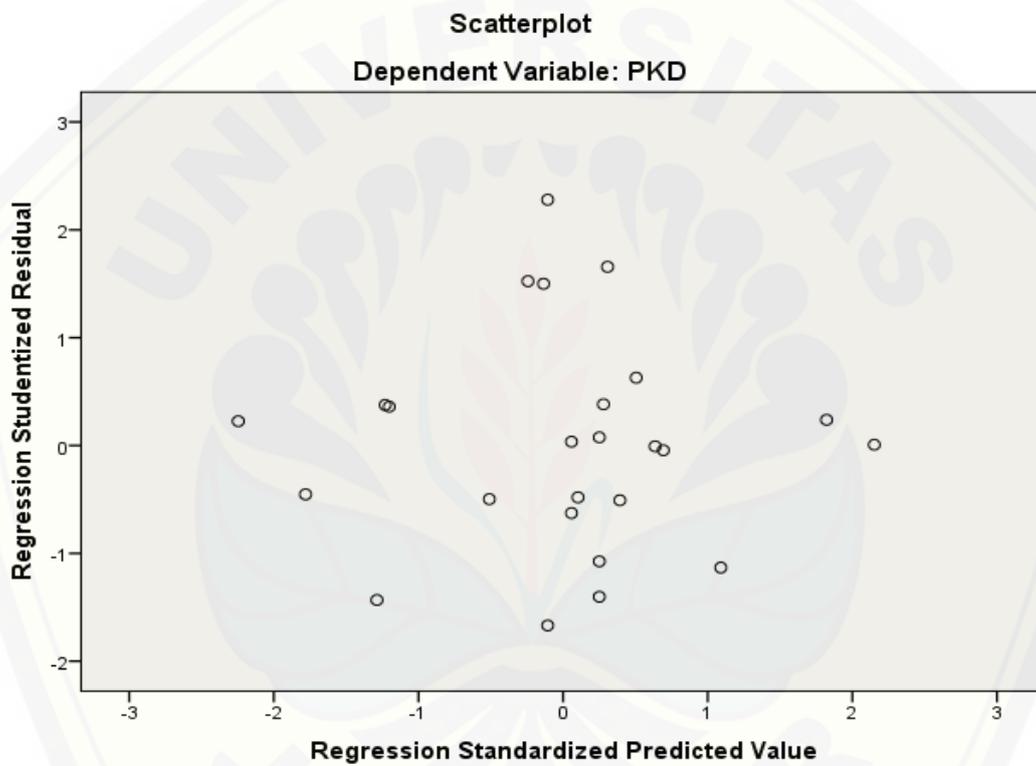
**b. Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PB	,992	1,008
	PD	,992	1,008

a. Dependent Variable: PKD

**c. Uji Heteroskedastisitas**



### Hasil Pengujian Hipotesis

#### a. Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	366,120	2	183,060	4,576	,022 <sup>b</sup>
	Residual	880,040	22	40,002		
	Total	1246,160	24			

a. Dependent Variable: PKD

b. Predictors: (Constant), PD, PB

#### b. Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,542 <sup>a</sup>	,294	,230	6,325

a. Predictors: (Constant), PD, PB

b. Dependent Variable: PKD

#### c. Uji T

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26,539	11,245		2,360	,028
	PB	,643	,274	,422	2,347	,028
	PD	-,377	,179	-,379	-2,106	,047

a. Dependent Variable: PKD

**Rekapitulasi Jawaban Responden***Personal Background*

No Responden	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	JUMLAH
1	5	4	5	2	4	5	2	4	4	2	37
2	2	2	2	4	2	2	4	2	5	4	29
3	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	34
4	5	4	5	2	5	2	2	5	4	2	36
5	3	5	3	5	3	5	5	3	2	5	39
6	4	5	4	4	4	4	4	4	2	4	39
7	3	4	3	5	3	5	5	3	2	5	38
8	4	4	4	4	4	5	4	4	2	4	39
9	4	5	4	4	4	5	4	4	2	4	40
10	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	34
11	2	4	2	4	2	2	4	2	4	4	30
12	5	4	5	5	5	2	2	5	2	5	40
13	4	5	4	4	4	4	2	4	4	4	39
14	4	5	4	4	2	2	4	4	4	4	37
15	3	4	3	5	3	5	5	3	2	5	38
16	4	5	4	3	4	5	3	4	4	3	39
17	3	5	3	4	3	5	4	3	4	4	38
18	2	5	2	2	2	5	2	2	5	2	29
19	4	4	4	2	4	4	2	4	2	2	32
20	4	4	4	4	4	5	4	4	2	4	39
21	2	4	2	2	2	2	2	2	5	2	25
22	4	2	4	4	4	5	4	4	4	4	39
23	5	4	5	2	5	4	2	5	4	2	38
24	2	2	2	2	2	4	2	2	5	2	25
25	3	4	3	2	3	4	2	3	4	2	30

**Rekapitulasi Jawaban Responden****Pengetahuan Dewan tentang Anggaran**

No. Responden	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	JUMLAH
1	2	2	4	2	2	4	4	2	4	4	2	32
2	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	38
3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	30
4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	40
5	2	2	4	2	4	4	4	4	4	2	4	36
6	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	40
7	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
8	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
13	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	42
14	2	4	4	2	4	2	4	4	4	2	4	36
15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
17	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	38
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
20	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	40
21	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	24
22	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	40
23	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
24	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
25	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	40



## DATA RESPONDEN

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan	Fraksi	Strata Pendidikan
1.	H.M. JONI SUBAGIO, S.H,M.H	L	51	WAKIL KETUA DPRD	PKB	S2
2.	ISMOKO, S.E	L	64	WAKIL KETUA DPRD	GOLKAR-PAN	S1
3.	SRI UTAMI FAKTUNINGSIH	P	44	WAKIL KETUA DPRD	DEMOKRAT	S1
4.	HEKSA SUDARMADI, S.H	L	44	ANGGOTA KOMISI IV	PDI-P	S1
5.	MADE SUWASTIKO, S.E	L	46	ANGGOTA KOMISI I	PDI-P	S1
6.	IRIANTO, S.H	L	48	ANGGOTA KOMISI III	PDI-P	S1
7.	HERY SUGIARTO, S.H	L	49	ANGGOTA KOMISI I	PDI-P	S1
8.	EKO HARIYONO S.Pd	L	44	WAKIL KETUA KOMISI III	PDI-P	S1
9.	FICKY SEPTALINDA, S.E	P	32	KETUA KOMISI I	PDI-P	S1
10.	SUGENG MUNARSO	L	51	WAKIL KETUA KOMISI II	PDI-P	SMA
11.	Hj. SITI MAFROCHATIN NI'MAH,S.Pd., M.M	P	45	ANGGOTA KOMISI II	PKB	S2
12.	H. AHMAD MUNIB SYAFA'AT, LC. M.E.I	L	40	ANGGOTA KOMISI IV	PKB	S2
13.	UMI KULSUM, SH	P	56	SEKERTARIS KOMISI III	GOLKAR-PAN	S1
14.	MARIFATUL KAMILA, SH	P	43	KETUA KOMISI II	GOLKAR-PAN	S1
15.	SOFIADI SUSIADI, A.Md	L	42	WAKIL KETUA KOMISI IV	GOLKAR-PAN	D3
16.	MUHAMMAD SAHLAN, S.Sos., M.A	L	40	ANGGOTA KOMISI III	GOLKAR-PAN	S2
17.	ANDIK PURWANTO, S.Hut	L	42	ANGGOTA KOMISI II	GERINDA-PKS	S1

18.	H. EKO SUSILO NURHIDAYAT, S.E.,M.M	L	42	ANGGOTA KOMISI I	GERINDA-PKS	S2
19.	NENI VIANTIN DIYAH MARTIVA, S.Pd	P	45	ANGGOTA KOMISI III	GERINDA-PKS	S1
20.	HANDOKO, S.E	L	49	ANGGOTA KOMISI III	DEMOKRAT	S1
21.	Drs.SYAHRONI	L	48	ANGGOTA KOMISI III	PPP	S1
22.	SYAMSUL ARIFIN, S.H	L	44	ANGGOTA KOMISI I	PPP	S1
23.	Ir. BASUKI RACHMAD	L	43	KETUA KOMISI III	HANURA- NASDEM	S1
24.	AHMAD MASROHAN, S.Ag	L	40	ANGGOTA KOMISI IV	HANURA- NASDEM	S1
25.	ALI MUSTOFA, A.Md	L	51	ANGGOTA KOMISI III	HANURA- NASDEM	D3